

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN ALIH FUNGSI HUTAN
BUKIT BETABUH DI KABUPATEN KUANSING
PROVINSI RIAU

A. Kondisi Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.⁴⁷

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, dan Kecamatan Benai. Sebagai

⁴⁷⁴⁷ [Http//www.kabupatenkuantan.singingi.go.id](http://www.kabupatenkuantan.singingi.go.id)

pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah : Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman. Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012, jumlah kecamatan Kabupaten Kuansing tercatat menjadi 15 daerah kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Benai
- b. Kecamatan Cerenti
- c. Kecamatan Gunung Toar
- d. Kecamatan Hulu Kuantan
- e. Kecamatan Inuman
- f. Kecamatan Kuantan Hilir
- g. Kecamatan Kuantan Mudik
- h. Kecamatan Kuantan Tengah
- i. Kecamatan Logas Tanah Darat
- j. Kecamatan Pangean
- k. Kecamatan Singingi
- l. Kecamatan Singingi Hilir
- m. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
- n. Kecamatan Sentajo Raya
- o. Kecamatan Pucuk Rantau⁴⁸

2. Geografis Kabupaten Kuantan Singingi (Kuantan)

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan

⁴⁸ www.kabupaten-kuansing.co.id

kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.⁴⁹

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.

⁴⁹[http://www Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan Kbupaten Kuansing](http://www.Dinas%20lingkungan%20hidup%20dan%20Kehutanan%20Kbupaten%20Kuansing)

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (Lima Belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

Sebelah Utara dengan	Kabupaten Kampar dan Pelalawan
Sebelah Selatan dengan	Propinsi Jambi
Sebelah Barat dengan	Propinsi Sumatera Barat
Sebelah Timur dengan	Kabupaten Indragiri Hulu

3. Topografi dan Geologi Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut. Secara struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

4. Iklim dan Hidrologi Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c – 22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

5. Kehidupan Sosial Masyarakat Kabupaten Kuansing

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 1945 Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat Beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan telah

dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarakkan kehidupan Bergama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat beribadatan, pembangunan tempat beribadahtan yang semakin berkembang.

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten singing merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pendatang yang dominan diantaranaya adalah suku jawa yang dating ke kabupaten kauntan singing melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan berjenjang dari tingkat Sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Kabupaten kuantan singing memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut menghasilkan keluaran yang optimal apabila dikelola dengan baik. Jumlah sekolah negeri, SLTP negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah(Wajib belajar 9 tahun). Jumlah SLTP dan SLTA negeri mengalami banyak penigkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah,merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutan

puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

B. Lahan dan Hutan Kabupaten Kuansing

1. Kondisi Umum Lahan dan Hutan di Kuansing Provinsi Riau

Kabupaten kuansing merupakan salah satu daerah otonomi di Propinsi Riau yang memiliki sumberdaya alam hutan terluas di pulau Sumatra. Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Hektar Pada tahun 1982 tutupan hutan alam Provinsi Riau masih meliputi 78 % (6.415.655 hektar) dari luas daratan Provinsi Riau 8.225.199 Ha (33% dari luasan tahun 2005 daratan Riau). Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata tiap tahun kehilangan hutan alamnya seluas 160.000 Hektar/ tahun dan selama periode 2004-2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu Hektar.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera 4,044 juta hektar⁵⁰ (56,1% dari luas lahan gambut Sumatera atau 45 % dari luas daratan provinsi Riau. seiring semakin berkurangnya hutan lahan kering dataran rendah daerah Riau. Hutan Rawa Gambut kini benar benar terancam. Tutupan alam Lahan gambut/ rawa gambut provinsi Riau pada tahun masih 2002 masih

⁵⁰ <http://www.dispenduk Kanupaten Kuansing>

2,280,198 ha. Pada tahun 2007 hutan alam Lahan gambut hanya 1,603,008 ha. Selama periode ini, provinsi Riau rata-rata kehilangan 135,438 hektar/tahun dan dalam waktu 5 tahun (2002-2007) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam yang tersisa di tahun 2002.

Mengingat besarnya produksi kehutanan ini, dimana Kabupaten Kuansing termasuk sebagai produsen kayu utama di Provinsi Riau, maka industri pengolahan kayu dan perkebunan menjadi prospek yang menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan hutan lindung. Hutan merupakan bagian penting terpeliharanya keseimbangan lingkungan Hidup. Menurut survey dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing Hutan di Kabupaten Kuansing menurut tataguna hutan adalah seluas 317.633 Ha atau 41,5% luas wilayah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutan produksi : 142.633 ha
- b. Hutan Lindung : 71,902
- c. Hutan suaka margasatwa : 103.080 ha

Dengan luas hutan yang hampir separuh dari luas daerah tersebut maka produksi hasil hutan tersebut merupakan andalan untuk memperoleh pendapatan bagi Kabupaten Kuansing .Luas kawasan hutan sekitar 1422.6333 ha.merupakan hutan yang berstatus sebagai hutan produksi. Diharapkan potensi hutan produksi seluas ini dapat mendukung pembangunan ekonomi dalam segala aspeknya.

Jenis produksi hasil hutan diantaranya adalah kayu, getah, biji dan pangan. Kabupaten Kuansing juga memiliki kawasan hutan yang berstatus hutan Lindung dan Hutan Suaka Margasatwa.

2. **Masalah dan Kondisi Hutan di Kabupaten Kuansing**

Masalah lingkungan timbul sebagai akibat dari ulah manusia itu sendiri. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem yang akan mempengaruhi kelstarian sumber daya alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, dan meningkatnya global warming(perubahan suhu) yang terjadi di Kabupaten Kuansing.

Kabupaten Kuansing sebagai daerah yang rawan kerusakan hutan dan rawan bencana kabut asap serta kekeringan,seharus nya pemerintah harus mempunyai Perencanaan kelola tata ruang wilayah yang berbasisi resiko bencana. Padahal wilayah dengan risiko bencana penting untuk menghindari munculnya korban seeandainya bencana terjadi.

C. **Faktor –faktor Penyebab Alih fungsi Lahan Hutan Lindung**

Faktor penyebab maraknya masyarakat maupun perusahaan melakukan alih fungsi lahan di Kabupaten Kuansing karena didesak oleh berkembangnya perekonomian yang menyebabkan mayoritas Perusahaan hanya mementingkan keunrungan semata tanpa melihat dampak kerusakan lingkungan sekitarnya, adapun faktor tersebut :

1. Pembukaan Hutan Akasia (HTI) di lahan Gambut

Banyak pembukaan hutan untuk tanaman Pohon akasia sebagai bahan pembuat kertas oleh perusahaana-perusahaan khususnya oleh PT. Indah kiat Pulp and Paper(App Group)

2. Perkebunan skala besar

Selain keberadaan 2 perusahaan terbesar di asia, menjamurnya Perkebunan sawit skala besar merupakan faktor utama penyebab kehancuran hutan lindung dan hutan gambut di Riau khususnya Kabupaten Kuansing.

3. Keterkaitan dengan Perizinan Perkebunan

Definisi kawasan perkebunan tidak ditegaskan secara jelas dalam PP Nomor 26 tahun 2008. Artinya perkebunan hanya diizinkan pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi HPK kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi di tetapkan kriteria,memiliki faktor kemiringan lereng,jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat) dan /atau merupakan kawasan yang apabila di konversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.(pasal 64 ayat 4 PP 26 2008).

Dari definisi diatas maka dapat dilihat bahwa Perizinan perkebunan tidak dibolehkan berada dalam kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas,kawasan hutan produksi.

Berdasarkan data perizinan perkebunan yang ada pada draft RTWP 2001-2015, kawasan hutan Produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan kepmen 137 tahun 1986 tentang tata guna hutan kesepakatan maka terdapat seluas 724.600 Ha izin perkebunan yang tidak sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2008 yang terdiri dari 353.800 Ha pada kawasan lindung, 190.000 Ha pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan 180.000 Ha pada Kawasan Hutan Produksi.

4. Konflik Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTWP dilakukan dengan mengacu pada RTWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), kemudian RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) juga harus mengacu pada RTWP. Hal tersebut dimaksudkan agar ada sinkronisasi Pembangunan antar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota. RTWN disusun untuk jangka 25 tahun, RTWP untuk jangka 15 Tahun, dan RTWK untuk jangka waktu 10 Tahun. Revisi atau Peninjauan kembali dapat dilakukan setiap 5 tahun. Revisi atau peninjauan bertujuan untuk mengsinkronisasikan kembali berbagai perkembangan kebijakan daerah, Nasional maupun internasional yang mungkin muncul di tengah perjalanan.⁵¹

⁵¹ Data dan Fakta Pemanfaatan Ruang Prov. Riau

Pentingnya penataan ruang ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan Pembangunan yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak keluar dari arahan pemanfaatan ruang yang sudah ada. Secara implisit Tata Ruang juga memuat tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Baik dalam hal Penetapan/ perubahan status kawasan hutan, pemberian pemukiman/perkotaan dan pedesaan, dan lain-lain jika dilihat dari perspektif Ekologis Tata Ruang juga berfungsi untuk memberikan kepastian bagi perlindungan/ pelestarian terhadap kawasan, ekosistem, dan habitat yang memiliki nilai ekologis tinggi, Kemudian Maknanya akan lebih luas apabila dilihat dari perspektif Sosial, ekonomi, Budaya dan Politik.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa:

- a. Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang
- b. Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian
- c. Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diikuti dengan keluarnya PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata ruang Wilayah Nasional.

D. Akibat Alih Fungsi Lahan Hutan Lindung Bukit Betabuh

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Alih fungsi lahan hutan lindung khususnya hutan Lindung Bukit betabuh yang ada di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Keterancaman Hutan Rawa Gambut

Sering semakin berkurangnya hutan lahan kering daratan rendah Riau termasuk Kabupaten Kuansing. Hutan rawa gambut kini benar-benar terancam. Tutupan lahan alam lahan gambut/ rawa gambut di Provinsi Riau pada tahun 2002 masih 2,280,198 ha. Pada tahun 2007 hutan alam lahan gambut di Provinsi Riau hanya 1,603,008 Ha. selama periode ini, Provinsi Riau rata-rata kehilangan 135,438 hektar/tahun dan dalam waktu 5 tahun(2002-2007) provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam Lahan Gambut/Rawa gambut seluas 677,190 Ha atau total 19% dari hutan alam.

2. Kerusakan Ekologi

Bencana ekologis tahunan seperti kabut asap, banjir dan kekeringan telah memberikan dampak negative yang cukup besar bagi negeri ini. Hal ini merupakan sebuah indikator termudah untuk melihat bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kuansing sudah pada tahap mengkhawatirkan. Sayangnya Pemerintah Riau masih belum memiliki sense of disasters, sehingga bencana yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi dianggap bencana biasa saja. Penanganan bencana yang dilakukan

pemerintah selama ini hanya langkah kongkrit penyelesaian masalah. Terkesan bencana yang sangat tidak diinginkan oleh rakyat ini, sangat dinanti-nantikan kehadirannya oleh para penyelenggara negara ini. Bencana ekologis tahunan seperti kabut asap dan banjir mempunyai dampak besar bagi masyarakat.

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan Lahan merupakan agendan tahunan Riau, Khususnya pada musim kemarau (kering). Kerawanan hutan dan lahan di Provinsi Riau terhadap kebakaran terutama lahan (land clearing) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala besar dan skala kecil perusahaan.